

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa. Meski hal ini kerap menjadi kelebihan Indonesia, sayangnya keberagaman tersebut juga dapat menjadi pisau bermata dua yang menyebabkan terjadinya diskriminasi di tengah masyarakat yang heterogen. Allport dalam Sufiana et al. (2022) menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan tindakan penolakan terhadap individu atau kelompok yang menyebabkan hilangnya kesetaraan dalam hidup oleh individu atau kelompok lain akibat adanya rasa superior. Di Indonesia sendiri, diskriminasi terjadi pada beberapa kelompok rentan seperti kelompok etnis dan agama minoritas, LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan *queer/questioning*, hingga perempuan. Diskriminasi tersebut berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan hak kelompok minoritas tersebut seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, keadilan, hingga pengakuan atas identitas budaya mereka (Salsabila, 2024). Salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang turut menerima perlakuan diskriminatif adalah etnis Tionghoa.

Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa sendiri telah terjadi sejak lama. Salah satu rezim yang dikenal diskriminatif terhadap etnis Tionghoa adalah era Orde Baru (1966–1998). Era tersebut mengeluarkan beberapa kebijakan khusus seputar etnis Tionghoa. Sebagai contoh, adanya penggantian istilah “Tionghoa” menjadi “Cina” yang sering kali digunakan untuk merendahkan, kemudian larangan untuk penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa, adanya tekanan terhadap masyarakat Tionghoa untuk mengganti nama khas Tionghoa menjadi nama lain yang lebih mencerminkan Indonesia, hingga larangan perayaan budaya dan keagamaan Tionghoa di tempat umum. Salah satu regulasi kompleks lainnya seperti kewajiban masyarakat Tionghoa untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang mahal dan sulit untuk diperoleh. Terlebih terjadinya Kerusuhan Mei 1998 yang menimbulkan banyak korban jiwa bagi

masyarakat Tionghoa akibat tindakan penjarahan toko dan pemerkosaan (Tanasaldy, 2022).

Meski telah lebih dari satu dekade berlalu, bayang-bayang diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia masih menghantui hingga saat ini. Hal ini pun terlihat berita hoaks yang tersebar selama gelombang aksi demonstrasi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepanjang akhir Agustus 2025. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta *Kompas.com*, tersebar hoaks berupa pesan berantai untuk masyarakat Tionghoa yang memperingati agar tidak mengadakan perayaan besar dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Pesan tersebut disertakan dalam bentuk gambar yang mengindikasikan bahwa Tragedi 1998 disinyalir akan terjadi kembali (Tim Cek Fakta *Kompas.com*, 2025). Selain itu, tersebar pula pesan-pesan intimidasi lain seperti ancaman terjadinya penjarahan toko. Menurut Himawan (2025), berbagai hoaks tersebut bermunculan kembali karena masyarakat Tionghoa sebagai kelompok rentan dan minoritas menjadi sasaran empuk untuk dijadikan “kambing hitam” sehingga publik dapat teralihkan dari isu struktural seperti kegagalan pemerintah ataupun ketidakadilan sosial.

Adanya berbagai rekam jejak, penulisan sejarah, hingga pengalaman-pengalaman tokoh publik beretnis Tionghoa yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif tersebut mendorong munculnya karya-karya yang membahas soal isu diskriminasi masyarakat Tionghoa, salah satunya melalui media film. Hal ini dikarenakan film masa kini bukan hanya berperan sebagai sarana hiburan, melainkan juga media untuk mengedukasi sekaligus mengkritik fenomena sosial budaya yang kerap terjadi. Film sebagai media mampu mencerminkan masyarakat beserta kompleksitasnya. Maka dari itu, film punya kekuatan untuk menggerakkan penonton dalam bertindak, baik itu berupa peningkatan kesadaran, mendorong diskusi, maupun dukungan terhadap perubahan sosial lainnya (Rivera, 2022). Beberapa pembuat film pun mulai mengangkat isu dan fenomena yang dekat dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, termasuk isu diskriminasi pada etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini tercermin dari beberapa film

Indonesia seperti *Ngenest: Kadang Hidup Perlu Ditertawakan* (2015), *A Man Called Ahok* (2018), atau *Susi Susanti: Love All* (2019).

Ngenest: Kadang Hidup Perlu Ditertawakan (2015) merupakan film komedi garapan Ernest Prakasa yang menceritakan bagaimana kehidupannya sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa. Film ini menampilkan dirinya yang kerap diperlakukan secara berbeda oleh teman-temannya saat sekolah karena penampilannya bermata sipit dan berkulit putih. Pengalaman ini pun membuat Ernest berkeinginan untuk menikahi perempuan yang bukan dari etnis Tionghoa agar keturunannya tidak bernasib sama seperti dirinya (Wihayanti & Imanda, 2020). Adapun film lain seperti *A Man Called Ahok* (2018) yang menceritakan kisah hidup Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan sebutan Ahok. Meski dikenal sebagai politikus yang berasal dari etnis minoritas dan kerap mengeluarkan pernyataan keras, film ini menitikberatkan pada bagaimana kehadiran keluarga khususnya ayah dalam membentuk karakter Ahok selama di Belitung Timur. Film ini pun dinilai berhasil mengekskusi budaya Tionghoa dengan tidak berlebihan melalui penggunaan bahasa Khek (salah satu dialek Tionghoa) hingga representasi sifat-sifat khas Tionghoa seperti memiliki harga diri yang tinggi serta gaya bicara blak-blakan (CNN Indonesia, 2018).

Kemudian film lain seperti *Susi Susanti: Love All* (2019) yang menceritakan kisah hidup mantan atlet bulu tangkis perempuan legendaris Indonesia yakni Susi Susanti. Film ini fokus pada perjuangan dalam berlatih bulu tangkis demi mengharumkan nama Indonesia sekaligus masa-masa sulitnya saat bertemu dengan Alan Budikusuma. Walaupun fokus pada aspek nasionalisme, film ini juga menyuguhkan era Orde Baru dari sudut pandang Susi yang merupakan atlet beretnis Tionghoa. Film biopik ini memperlihatkan bagaimana Susi mendapatkan perlakuan tidak adil serta status kewarganegaraan dirinya yang masih belum jelas bahkan sebelum bertanding di Olimpiade Atlanta (CNN Indonesia, 2019).

Ketiga film tersebut dikemas dengan cara yang berbeda-beda seperti komedi, kekeluargaan, hingga nasionalisme. Meski begitu, film-film ini menjadi representasi budaya, penampilan orang beretnis Tionghoa, hingga menunjukkan bagaimana orang-orang tidak segan memperlakukan masyarakat Tionghoa secara

berbeda. Salah satu film terbaru yang turut mengangkat isu terkait perilaku diskriminatif ini adalah *Pengepungan di Bukit Duri* (2025).

Pengepungan di Bukit Duri merupakan film asal Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar dan telah tayang di bioskop sejak 17 April 2025. Film ini merupakan hasil kolaborasi antara rumah produksi Come and See Pictures dengan studio besar asal Hollywood Metro Goldwyn Meyer (Ranawati, 2025). Latar cerita *Pengepungan di Bukit Duri* berada di Indonesia pada 2027 dengan kondisi sosial yang buruk layaknya distopia akibat diskriminasi dan rasisme. Karakter utama dalam film ini yaitu Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey. *Pengepungan di Bukit Duri* mengikuti perjalanan Edwin sebagai guru pengganti dalam mencari keponakannya yang bersekolah di salah satu sekolah menengah atas (SMA) Jakarta Timur. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk pemenuhan harapan mendiang kakaknya sebelum meninggal dunia. Setelah berpindah-pindah tugas, ia pun akhirnya menerima tawaran untuk mengajar di SMA Duri, sekolah yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya anak “buangan” dan bermasalah. Identitas Edwin yang merupakan keturunan Tionghoa membuat pencariannya dipenuhi tantangan, khususnya saat menghadapi para murid.

Ketegangan cerita meningkat ketika ia bersama seorang guru bernama Diana serta dua siswa lain terjebak di sekolah saat sedang mendekor ruang kelas pada Minggu pagi. Jefri pun akhirnya mengetahui kedatangan Edwin ke sekolah pada hari itu. Sebagai murid bermasalah yang tidak menyukai Edwin, ia mengajak teman-temannya untuk memberikan gangguan dan ancaman. Situasi diperparah dengan kerusuhan yang memuncak di berbagai area, membuat petugas yang saat itu harusnya menjaga sekolah malah pulang untuk menyelamatkan diri. Edwin bersama tiga orang lainnya pun terkepung oleh Jefri dan teman-temannya di dalam SMA Duri. Selain isu diskriminasi etnis Tionghoa, *Pengepungan di Bukit Duri* juga menyoroti isu sosial lain seperti kekerasan sistemis dan pendidikan yang tak berpihak pada anak muda (Ranawati, 2025). Selama penayangannya, film dengan genre laga dan drama ini berhasil memperoleh penonton sebanyak 1.892.369 orang (Riandi & Sembiring, 2025).



Gambar 1. 1 Poster Film *Pengepungan di Bukit Duri* (2025)

Sumber: [idntimes.com](https://www.idntimes.com)

Film ini menyebut Bukit Duri sebagai latar tempatnya yang mana di dunia nyata sendiri lokasi tersebut berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Meskipun begitu, Joko Anwar dalam konferensi pers pada Januari 2025 lalu menjelaskan bahwa lokasi yang dimaksud bersifat fiksi atau imajiner. Maka dari itu, alih-alih menyebut Jakarta Selatan, film ini justru menyebut Bukit Duri sebagai salah satu wilayah di Jakarta Timur. Menurut Joko Anwar, nama Bukit Duri itu ia pilih karena ia ingin masyarakat tetap merasa relevan dan familier dengan nama daerahnya saat menonton film ini (Priwiratu, 2025). Dengan demikian, *Pengepungan di Bukit Duri* sebagai salah satu bentuk komunikasi massa ingin mengonstruksi penggambaran serta nilai-nilai yang mampu membuat penontonnya merasa dekat dan pesan film dapat tersampaikan, salah satunya melalui penggunaan nama Bukit Duri meskipun lokasi yang ada di film tersebut bersifat imajiner. Pemilihan nama dalam film bukan sekadar elemen cerita, melainkan bagian dari strategi komunikasi untuk menciptakan kedekatan dengan penonton. Hal ini sejalan dengan kecenderungan industri film Indonesia yang juga mempertimbangkan selera masyarakat lewat dominasi genre tertentu.

Di Indonesia sendiri, genre drama terus menjadi favorit masyarakat sepanjang tahun. Berdasarkan hasil analisis Tim Jurnalisme Data Harian *Kompas* terhadap data film Indonesia sepanjang 2007 hingga 2024 di laman *filmindonesia.or.id*, genre drama mendominasi sebagai film dengan penonton terbanyak tiap tahunnya. Total 107 film drama dari 207 film yang berhasil masuk ke dalam daftar 15 film dengan penonton terbanyak per tahun selama 18 tahun terakhir. Pertumbuhannya minatnya pun terbilang stabil yang mana jumlah penontannya meningkat dari sekitar 60 juta pada periode 2007–2016 menjadi lebih dari 83 juta saat periode 2017–2024 (Wisanggeni et al., 2025). Chief Content Office Visinema Studios Anggia Kharisma dalam Wisanggeni et al. (2025) menjelaskan bahwa genre drama terus menjadi yang paling banyak ditonton karena minat masyarakat terhadap cerita yang bermakna dan dekat dengan kenyataan sehari-hari. Ia memberi contoh film horor Indonesia sekalipun terdiri dari unsur-unsur drama keluarga atau spiritualitas yang dibalut dengan nuansa menegangkan. Tak hanya drama, genre lain yang cukup populer di Indonesia adalah aksi atau laga. Survei yang dilakukan oleh Tim Jurnalisme Data Harian *Kompas* selama 10 hingga 16 Maret 2025 menunjukkan 26,26 persen responden memilih genre aksi/*thriller* sebagai jenis film yang ingin ditonton saat libur lebaran. Kemudian, diikuti oleh film fiksi sains/*fantasi/superhero*, animasi/film anak, horor/misteri, komedi, drama romansa, dan terakhir dokumenter.

Pengepungan di Bukit Duri sebagai film yang menggabungkan kedua genre populer tersebut menunjukkan sisi realitas terburuk negara yang mungkin terjadi. Film ini tidak hanya menunjukkan aksi Edwin dalam bertahan di tempat yang penuh dengan kekerasan dan diskriminatif, tetapi juga memberikan gambaran akan drama kehidupan sosial yang marak terjadi tetapi luput dibicarakan orang-orang. Joko Anwar selaku sutradara dalam wawancara bersama *Tempo* menjelaskan bahwa film ini adalah bentuk dari keresahannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atas berbagai permasalahan sosial yang mendesak untuk dibicarakan, seperti minimnya apresiasi terhadap guru, meningkatnya kekerasan di lingkungan remaja, hingga mengakarnya isu rasisme di Indonesia. Ia menilai bahwa sistem pendidikan kerap kurang mendukung pembentukan karakter generasi bangsa. Ditambah lagi dengan

minimnya sosok negarawan yang dapat diteladani karena mendarah dagingnya sifat rasa ingin memperkaya diri pejabat publik. Hal itulah yang ingin ia tunjukkan melalui *Pengepungan di Bukit Duri* (Jasmine, 2025b). Dalam pemutaran pers *Pengepungan di Bukit Duri*, Joko Anwar menyampaikan bahwa film ini mudah diikuti sehingga mampu memantik percakapan dan membuka ruang diskusi masyarakat untuk menghadapi kenyataan sosial yang kerap dihindari (Fahky P., 2025). Berbagai adegan kekerasan baik verbal maupun nonverbal yang ditunjukkan secara eksplisit dalam film ini membuat khalayak teringat kembali akan trauma terjadinya kerusuhan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya Kerusuhan Mei 1998. Tragedi tersebut kerap dipandang sebagai isu nasional sensitif dan tabu di Indonesia karena melibatkan bentuk kekerasan massa yang ditujukan kepada bisnis, properti, serta masyarakat Tionghoa itu sendiri sehingga jarang didiskusikan oleh masyarakat (Himawan et al., 2022). Peristiwa tersebut pun dinilai secara sengaja disinggung dalam film, salah satunya terlihat dari frekuensi radio 98.05 FM yang diduga merujuk pada Mei 1998 (Riandi & Pangerang, 2025). Morgan Oey selaku aktor utama dalam film ini turut mengakui bahwa adanya kejadian besar terkait etnis Tionghoa pada masa lampau menyisakan trauma yang membuatnya mampu merasa *relate* atau memiliki hubungan emosional dengan karakter Edwin. Meskipun Morgan lahir dan tumbuh di Singkawang, kota yang dikenal paling toleran, ia menilai bahwa efek peristiwa diskriminasi dan budaya kekerasan yang telah ada di Indonesia sejak ia SMA berefek secara transgenerasional atau dari generasi ke generasi berikutnya (Awaliyah, 2025).

Kesuksesan film ini pun menjadi viral di media sosial seperti TikTok, X, dan Instagram. Berbagai orang membagikan kesan yang didapatkan setelah menonton film ini serta menunjukkan bagaimana film ini mampu menjadi relevan dengan apa yang dialami masyarakat Tionghoa pada masa lalu. Kolom komentar pun turut dipenuhi oleh berbagai macam balasan, beberapa di antaranya menceritakan pengalaman mereka masing-masing saat tragedi Mei 1998 terjadi, sedangkan sisanya bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu dan apa penyebabnya. Tidak hanya mengingatkan kembali akan trauma, film ini pun turut membuat orang-orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi sadar terkait

sejarah kelam Kerusuhan Mei 1998. Menurut studi yang dilakukan Purdey (2006), Kerusuhan Mei 1998 harus dianggap sebagai serangan sistematis terhadap masyarakat Tionghoa-Indonesia karena kebrutalan dan kekerasan berskala besar yang terjadi merupakan puncak dari sejarah diskriminasi terhadap etnis tersebut, terlebih dengan adanya kebijakan diskriminatif oleh pemerintahan Orde Baru yang memperkuat stigma anti-Tionghoa dan menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam politik (Himawan et al., 2022). Perilaku diskriminasi tersebut mencakup penjarahan, kerusakan properti, hingga kasus pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa (Tanasaldy, 2022). Oleh karena itu, film ini tidak diproduksi hanya untuk sebagai hiburan semata, tetapi merepresentasikan ketakutan masa lalu yang pernah ada saat Mei 1998. Dengan berbagai tindakan diskriminatif yang terjadi sejak lama, *Pengepungan di Bukit Duri* dinilai oleh sebagian orang sebagai sebuah pembelajaran agar masyarakat tidak melupakan sejarah dan terus menjaga moralitas sehingga apa yang terjadi dalam film ini tidak terealisasikan di dunia nyata.



Gambar 1. 2 Komentar terkait *Pengepungan di Bukit Duri* dan Tragedi 1998 dalam konten TikTok @elsa.novias
Sumber: TikTok/@elsa.novias

Adanya berbagai respons terhadap *Pengepungan di Bukit Duri* di beragam platform membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana pemaknaan penonton terhadap diskriminasi yang ditampilkan dalam film tersebut berdasarkan analisis resepsi khalayak yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Berdasarkan teori tersebut, Hall et al. (2005) menjelaskan bahwa hasil pemaknaan audiens dapat dibagi ke dalam tiga jenis posisi, yaitu *dominant-hegemonic* atau penerimaan makna secara sepenuhnya, *negotiated* atau campuran antara penerimaan dan penolakan, dan *oppositional* atau penolakan sepenuhnya. Dengan teori tersebut, peneliti mampu mengetahui bagaimana khalayak menafsirkan suatu bentuk representasi diskriminasi dalam film dan mengidentifikasi secara mendalam mengenai alasan penonton menerima, menegosiasikan, atau bahkan menolak bentuk-bentuk penggambaran etnis Tionghoa yang ada di dalam film *Pengepungan di Bukit Duri* sesuai pengalaman serta refleksi pribadi.

Maka dari itu, penelitian ini berupaya melihat sudut pandang penonton *Pengepungan di Bukit Duri* beretnis Tionghoa yang pernah mengalami masa-masa Kerusuhan Mei 1998 di mana menjadi salah satu tragedi terkelam dalam sejarah masyarakat Tionghoa-Indonesia dan banyak dibicarakan pasca penayangan film ini. Wawancara secara mendalam terhadap orang-orang yang berpengalaman tersebut akan memberikan pengetahuan secara mendalam ketika membandingkan bagaimana kejadian sesungguhnya saat 1998 dengan bentuk penggambaran dalam film. Mengingat latar lokasi film ini yaitu Bukit Duri bersifat imajiner, maka domisili informan saat mengalami kerusuhan tersebut pun tidak terbatas pada wilayah Jakarta semata. Maka dari itu, beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari beberapa daerah seperti Jakarta, Palembang, hingga Kalimantan Barat. Dengan demikian, peneliti mampu memperoleh informasi yang beragam seputar bagaimana informan menghadapi situasi kerusuhan sebagai orang keturunan Tionghoa. Pengalaman menonton mereka menjadi bentuk refleksi yang akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi ragam pemaknaan terhadap *Pengepungan di Bukit Duri* sesuai dengan teori resepsi Stuart Hall.

Pemilihan informan yang merupakan penyintas atau individu yang mengalami Kerusuhan Mei 1998 menjadi penting karena penelitian ini menitikberatkan pada kekayaan pengalaman dan kedalaman memori yang dimiliki informan. Mereka yang mengalami memiliki pemahaman dan ingatan yang lebih kuat, baik secara konteks maupun emosional. Hal tersebut membuat adanya kesenjangan antara orang yang secara langsung hidup di era tragedi tersebut dengan orang yang tidak.

Penelitian ini tidak hanya berbicara terkait isu diskriminasi yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana film sebagai media komunikasi massa memiliki lapisan makna yang dapat ataupun gagal ditangkap oleh penonton. Dalam konteks *Pengepungan di Bukit Duri*, penelitian ini melihat bagaimana film mampu membangkitkan trauma akan pengalaman sejarah yang buruk, memperkuat prasangka masyarakat terhadap isu diskriminasi di Indonesia, atau menjadi sarana edukasi. Selain itu, penelitian ini turut menunjukkan peran aktif khalayak sebagai penonton yang tidak hanya sekadar menikmati film sebagai hiburan, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil posisi terhadap pesan yang disampaikan dalam film berdasarkan latar belakang masing-masing. Maka dari itu, penelitian ini memanfaatkan studi kualitatif deskriptif dengan analisis resepsi agar peneliti mampu mendalami setiap fenomena dan konteks yang ada seputar pemaknaan dan pengalaman reflektif khalayak terhadap film berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Film *Pengepungan di Bukit Duri* mengusung berbagai isu sosial di Indonesia, salah satunya yaitu diskriminasi pada etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kepada khalayak agar tidak lupa sekaligus tidak takut untuk membicarakan isu-isu tersebut. Meskipun memiliki tujuan baik, film tersebut menuai berbagai macam bentuk respons, baik positif maupun berupa kritik. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana khalayak, khususnya penonton beretnis Tionghoa yang telah mengalami masa-masa Kerusuhan Mei 1998 memaknai penggambaran bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam film *Pengepungan di Bukit Duri* sesuai pengalaman reflektif. Pemilihan informan yang mengalami masa 1998 menjadi krusial karena adanya

pengalaman dan memori kolektif pada waktu tersebut memberikan kedalaman reflektif dalam menerima, menegosiasikan, atau menolak penggambaran diskriminasi pada film.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana resepsi khalayak mengenai diskriminasi pada etnis Tionghoa pada film *Pengepungan di Bukit Duri*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui resepsi khalayak secara mendalam mengenai diskriminasi pada etnis Tionghoa dalam film *Pengepungan di Bukit Duri* (2025).
2. Menganalisis dan mengidentifikasi resepsi khalayak mengenai diskriminasi pada etnis Tionghoa dalam film *Pengepungan di Bukit Duri* (2025).

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada perkembangan Ilmu Komunikasi dan teori analisis resepsi khalayak yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Melalui penggunaan teori tersebut sebagai salah satu dasar penelitian, hasil penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman audiens bagaimana khalayak dalam mengonsumsi suatu media tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi punya peran aktif dalam memaknai atau merespons pesan dalam media tersebut sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat berguna dalam lingkup pekerjaan profesional, khususnya dalam industri perfilman dan produksi konten kreatif ketika menciptakan karya yang mengangkat suatu isu sosial atau referensi

sejarah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan evaluasi untuk memahami bagaimana preferensi serta pemaknaan oleh penonton Indonesia dalam mengonsumsi konten yang mengangkat isu sosial dan sejarah, khususnya dalam konteks penelitian ini yaitu isu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dengan demikian, rumah produksi, sutradara, produser, hingga penulis naskah mampu menciptakan karya relevan bagi masyarakat.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan juga dapat mengingatkan masyarakat terkait isu-isu sosial di Indonesia, khususnya diskriminasi etnis Tionghoa dan bagaimana bentuk representasinya dalam sebuah film. Lewat hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana pemahaman khalayak terhadap bentuk diskriminasi dalam film *Pengepungan di Bukit Duri*, masyarakat mampu menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi konten atau bentuk media dan budaya populer lainnya yang mengangkat isu-isu sosial di sekitar.

1.6. Batasan Penelitian

Penelitian berikut memiliki beberapa batasan yang ditetapkan guna mengarahkan fokus penelitian dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh tetap relevan serta mampu dianalisis dengan tepat. Batasan pertama ada pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Maka dari itu, data yang diperoleh bersifat subjektif dan terbatas pada hasil interpretasi setiap informan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, informan yang berpartisipasi dalam penelitian berikut terbatas pada orang-orang yang telah menonton film *Pengepungan di Bukit Duri* dan mengalami Kerusuhan Mei 1998 sehingga tidak mengeksplorasi pandangan khalayak terkait isu-isu diskriminasi etnis Tionghoa lain di luar film tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mampu fokus pada resepsi khalayak mengenai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam film *Pengepungan di Bukit Duri*.